

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BELANJA MODAL, BELANJA BARANG, DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB) PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2014-2019

The Effect of Central Government Expenditure (Capital and Goods Expenditure, and Social Assistance Spending) on Gross Regional Domestic Product of Provincial Government, 2014-2019

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: slamet.widodo@dpr.go.id

Abstract

In order to carry out concurrent government affairs in regional level, the central government allocates spending to support investment growth in the regions through capital expenditure, goods expenditure and social assistance spending. This capital accumulation is intended to increase the output of local government goods and services which in turn will increase regional economic growth.

The purpose of this study is to analyze the Impact of Central Government Expenditure (Capital, Goods, and Social Assistance Expenditures) towards Gross Regional Domestic Product (PDRB) of provincial government for the period of 2014-2019. Data used was taken from BPS, the Ministry of Finance, and other relevant agencies. Analysis tools using data panel regression with fixed effect model. The results of the analysis shows that only capital expenditure has positive effect on PDRB, and social assistance expenditure has negative effect on PDRB. While goods expenditure variable is excluded from the model, since it not met the multicollinearity test

Keywords: capital and goods expenditure, social assistance spending, gross regional domestic product of provincial government

1. Pendahuluan

Sebelum era desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan sangat terpusat dan peran daerah hanya sebagai objek pembangunan dan menerima kebijakan yang dilaksanakan di tingkat pusat. Prioritas daerah seringkali harus disisihkan demi kepentingan nasional. Berbagai program berorientasi daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat. Dengan pemberlakuan otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah mulai membagi/menyerahkan kepada daerah sebagian kewenangan/urusannya di daerah. Urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut yang mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden untuk tujuan menjaga stabilitas nasional. Secara detail, pembagian urusan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014) dan konsekuensi pendanaan diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

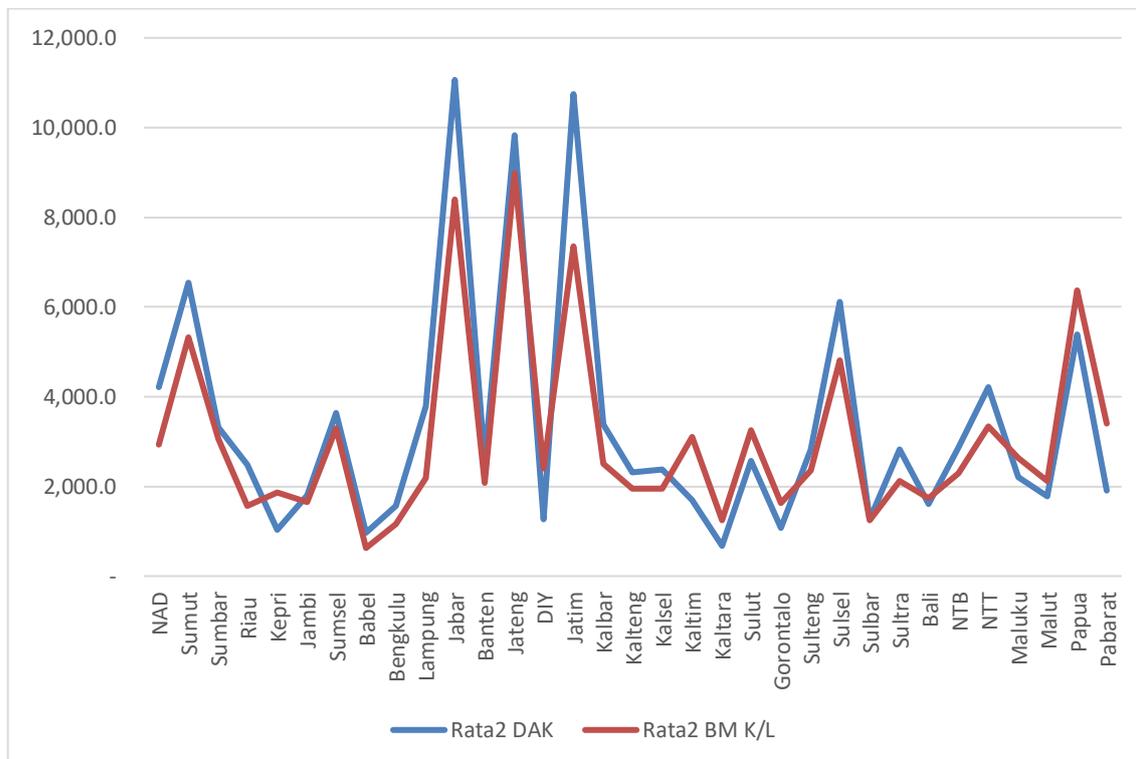
Dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah melalui asas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L). Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sendiri oleh K/L yang bersangkutan, melalui instansi vertikal di daerah, atau diserahkan melalui penugasan kepada daerah.

Dengan meningkatnya kewenangan daerah dalam mengelola sendiri prioritasnya, sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah perlu memastikan agar kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah tetap dalam koridor mencapai prioritas nasional dengan tidak meninggalkan kepentingan daerah yang belum berkembang dan minim sumber daya alam. Dengan demikian, peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dalam kerangka dana tugas pembangunan tetap diperlukan untuk kepentingan daerah.

Pendanaan melalui Tugas Pembantuan (TP) ditujukan untuk kegiatan berorientasi *output* secara fisik. Dalam pos anggaran K/L, pendanaan ini masuk dalam beberapa jenis belanja, yaitu belanja modal (BM), belanja barang (BB) dan belanja bantuan sosial (BBS). Sinergi belanja K/L dengan dana perimbangan yang langsung dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terus meningkat dari tahun ke tahun dan pendanaan melalui TP juga memiliki kecenderungan yang meningkat. Ini menjadi menarik untuk mengetahui efektivitas pendanaan melalui TP ini dalam mendorong PDRB daerah.

Dalam kurun waktu 2014 – 2019, alokasi pendanaan melalui TP (belanja modal) terus meningkat, di sisi lain alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami peningkatan. Rata-rata pendanaan kegiatan fisik melalui DAK lebih besar hampir di semua provinsi, kecuali di 11 provinsi, yaitu Provinsi (Prov.) Kepulauan Riau, Prov. DIY, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Utara, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Gorontalo, Prov. Bali, Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara, Prov. Papua, dan Prov. Papua Barat.

Gambar 1. Tabel Rata-rata DAK & Belanja Modal K/L Periode Tahun 2014-2019 (dalam miliar Rp)



Sumber: BPS, diolah

DAK merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang tujuan dan sasarannya hampir sama yaitu untuk kegiatan fisik yang menciptakan *output* barang modal yang menjadi salah satu pendorong perekonomian daerah. Belanja modal K/L dan DAK merupakan dua pendanaan bagi daerah yang memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Belanja modal K/L merupakan pendanaan yang berasal dari inisiatif K/L, sementara inisiatif pendanaan melalui DAK diusulkan oleh pemerintah daerah. Dari sisi pemanfaatannya, DAK lebih “kaku” karena berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan dari K/L yang bersangkutan yang diselaraskan dengan kepentingan daerah, sementara belanja modal K/L lebih berpegang pada pelaksanaan tugas dan fungsi K/L itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan data DAK, belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial serta pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu 2014-2019, kenaikan DAK diikuti dengan kenaikan PDRB, sementara penurunan alokasi belanja modal di 11 provinsi tidak diiringi dengan penurunan PDRB. Pengamatan terhadap data juga mengungkapkan bahwa penurunan belanja bantuan sosial tidak diikuti dengan penurunan PDRB. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh K/L terhadap PDRB provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati hubungan antara

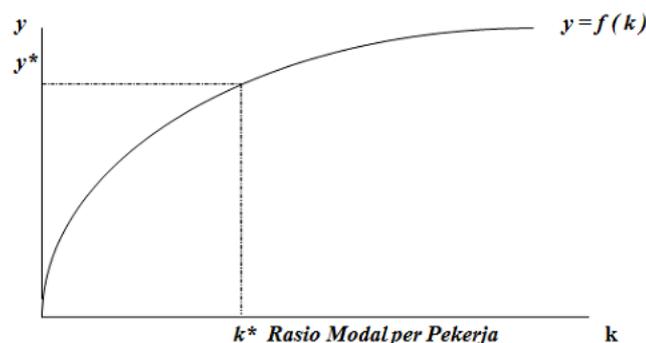
belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh K/L terhadap PDRB provinsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengalokasian anggaran K/L di daerah dalam rangka melaksanakan asas tugas pembantuan.

2. Tinjauan Pustaka

Intervensi pemerintah dalam perekonomian dilakukan karena dua alasan yaitu kegagalan pasar dan redistribusi. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar gagal dalam menghasilkan barang-barang dan jasa secara efisien. Meskipun efisiensi dapat tercapai, mekanisme pasar dapat menciptakan kesenjangan yang sangat tinggi di antara individu dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Kegagalan pasar tersebut disebabkan antara lain adanya barang publik, kompetisi yang tidak sempurna, informasi yang tidak simetris, dan adanya eksternalitas. Dengan demikian, diperlukan peran pemerintah untuk turut menghasilkan barang dan jasa secara efisien, khususnya untuk kepentingan publik dan mengatasi penyebab kegagalan pasar tersebut. Sementara itu, redistribusi pendapatan dapat dilakukan pemerintah melalui pengenaan pajak dan mengalihkannya kepada wilayah lain untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi, atau dengan cara memberikan bantuan sosial dan berbagai subsidi bagi masyarakat miskin.

Pentingnya peranan investasi modal fisik telah diformulasikan sejak lama. Salah satunya adalah model pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan oleh Solow (1987) dalam yang memperkenalkan aspek penggunaan teknologi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, perekonomian yang berhasil meningkatkan investasi secara permanen akan memiliki tingkat *output* yang lebih tinggi, dan untuk mencapai tingkat *output* yang lebih tinggi secara permanen sepenuhnya tergantung pada tingkat kemajuan teknologi dan tidak hanya bersandar pada investasi saja.

Gambar 2. Fungsi Produksi Per Kapita GDP



Sumber: Dornbusch et.al, 2004 dalam Latip (2009)

Gambar di atas menunjukkan fungsi produksi per kapita *Gross Domestic Product* (GDP) dengan variabel independennya rasio modal per pekerja, fungsi produksi per kapita tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = f(k)$$

Pada gambar tersebut penambahan kapital terus mendorong pertumbuhan *output*, sampai pada tingkat tertentu sehingga pertumbuhan *output* menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya. Pertumbuhan *output* sampai pada level tertentu didapat dari kombinasi modal dan tenaga kerja yang optimal. Meskipun kombinasi modal dan tenaga kerja memegang peranan penting dalam model pertumbuhan ekonomi, model pertumbuhan Solow (1987) menunjukkan bahwa faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja, namun kemajuan teknologi dan penambahan meningkatnya keterampilan tenaga kerja. Model pertumbuhan Solow juga mengasumsikan bahwa perekonomian bersifat tertutup dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Perekonomian bekerja sesuai dengan mekanisme pasar dalam kondisi *full employment*.

Namun demikian, kegagalan pasar dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi, sekaligus mendorong terciptanya kombinasi modal dan tenaga kerja pada tingkat yang optimal bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Intervensi yang dilaksanakan pemerintah, baik melalui APBN/APBD, tidak terlepas dari tiga fungsi ekonomi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Melalui fungsi alokasi, pemerintah mengalokasikan anggaran pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil (Kementerian Keuangan, 2014).

Pasca otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian urusan/kewenangan, yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pembagian urusan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 terbagi menjadi:

1. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat mencakup bidang politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.
2. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren inilah yang sampai saat ini masih diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, dengan cara melimpahkan kepada gubernur atau kepada

instansi vertikal di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, atau dengan cara menugaskan daerah berdasarkan asas TP. Urusan pemerintahan konkuren ini terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, perlindungan masyarakat dan sosial, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar antara lain tenaga kerja, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, pemberdayaan perempuan dan anak. Konsekuensi pelimpahan penugasan ini dibarengi dengan pendanaan yang dikenal dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Kedua jenis dana ini berasal dari APBN. Perbedaannya terletak pada tingkat pelimpahannya dan penggunaannya. Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh gubernur atau instansi vertikal pusat di daerah, sementara dana tugas pembantuan dilaksanakan oleh daerah dan desa (pelimpahan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota). Sedangkan dari sisi penggunaannya, dana dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan non fisik, dan dana tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Dalam belanja K/L, dana dekonsentrasi umumnya berupa belanja pegawai karena sebagian besar kegiatannya bersifat koordinasi dan sinkronisasi, sementara dana tugas pembantuan dalam bentuk belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial.

2.1. Teori Intervensi Pemerintah

Dalam tataran implementasinya, intervensi pemerintah pusat dalam perekonomian direalisasikan dalam bentuk belanja negara, khususnya klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial. Dalam kaitannya dengan investasi dan pertumbuhan PDRB, maka kajian hanya berfokus pada belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran, definisi atas masing-masing belanja adalah sebagai berikut:

- a. **Belanja modal** adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan Aset Tetap (AT) dan/atau aset lainnya atau menambah nilai AT dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi AT/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal dipergunakan antara lain untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal lainnya.
- b. **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) dan belanja perjalanan. Penggunaannya antara lain untuk kegiatan operasional dan non operasional, dan belanja pemeliharaan aset.

- c. **Belanja bantuan sosial** adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penggunaannya antara lain untuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Daerah perlu meningkatkan investasi modal fisik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Investasi modal fisik diperlukan mengingat modal fisik mengalami depresiasi/penyusutan seiring dengan masa penggunaan modal fisik tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan positif jika jumlah investasinya melebihi jumlah modal/kapital yang terdepresiasi. Intervensi pemerintah dalam belanja modal dan belanja barang di daerah diharapkan dapat mengakumulasi belanja modal daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Intervensi pemerintah diharapkan dapat menambah investasi modal fisik di daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan PDRB. Hubungan antara komponen belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial terhadap PDRB dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hubungan antara belanja modal dengan PDRB. Salah satu indikator besarnya investasi tercermin melalui besaran belanja modal yang dialokasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada barang modal atau fasilitas publik dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan *output* barang dan jasa dalam perekonomian. Peningkatan *output* produksi ini menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
- b. Hubungan antara belanja barang dengan PDRB. Salah satu pemanfaatan belanja barang adalah untuk pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja AT atau aset lainnya. Proses pengalihan aset tetap yang kegiatannya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, perlu melalui proses pengalihan yang cukup lama. Selama aset tersebut belum dialihkan, maka kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan belanja pemeliharaan atas aset tetap tersebut. Meskipun tidak menambah umur ekonomis, namun pengalokasian belanja pemeliharaan aset mutlak diperlukan untuk menjaga agar kapasitas kinerja aset tetap tidak tergerus lebih cepat dari umur ekonomisnya, sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah.
- c. Hubungan antara belanja bantuan sosial dengan PDRB. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (PMK No. 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran). Bantuan perlindungan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan,

penanggulangan bencana. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kegiatannya dapat berupa penyediaan akses perumahan/permukiman, kesempatan kerja, akses layanan kesehatan dan pendidikan, akses modal usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kemampuannya untuk menjaga/mempertahankan daya beli dan menyediakan akses dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu mendukung perekonomian daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Anasmen (2009) menggunakan variabel belanja modal, investasi swasta dan jumlah penduduk untuk menguji pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat periode 2000-2006. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode regresi berganda dan data panel dengan hipotesis penelitian yaitu besarnya belanja modal pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun (2000-2006). Hasil analisis regresi menunjukkan belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini didukung oleh uji statistik yang menunjukkan belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak disumbang oleh sektor pertanian yang tidak memiliki hubungan signifikan dengan belanja modal.

Hasil penelitian Sita (2016), yang menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan, menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode analisis menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan variabel belanja modal sebagai variabel eksogen dengan variabel endogen *intervening* yaitu pertumbuhan ekonomi dan variabel endogen tergantung yaitu kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) belanja modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, 3) belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Widada, et.al (2014), yang menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran di Indonesia menggunakan variabel belanja pemerintah, variabel tenaga kerja, dan variabel PDRB. Teknik analisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah (G) memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB kabupaten/kota hasil pemekaran. Dari hasil analisis terhadap laporan realisasi APBD kabupaten/kota hasil pemekaran untuk tahun anggaran 2008-2010, ditemukan bahwa realisasi total belanja 45 pemerintah daerah kabupaten/kota hasil pemekaran selalu menunjukkan adanya peningkatan tiap tahunnya. Namun jika dicermati lebih jauh, peningkatan realisasi total belanja tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan realisasi belanja modal.

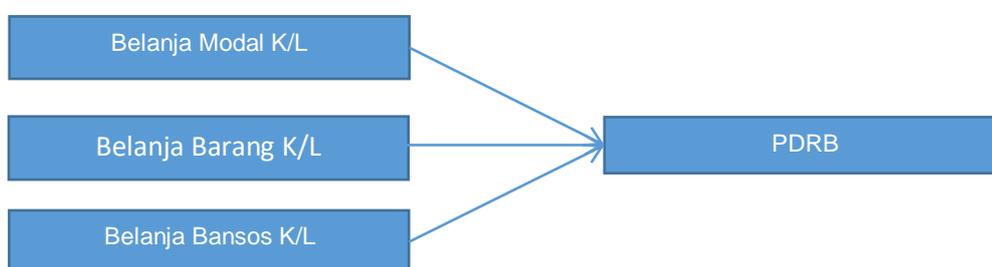
3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah *data panel* berbentuk *time series* dari tahun 2014-2019, dan data *cross section* yang terdiri atas 33 provinsi di Indonesia. Data PDRB diperoleh dari publikasi BPS tentang PDRB provinsi menurut lapangan usaha 2015-2019, dan data belanja pemerintah (K/L) diperoleh dari laman Peta Data APBN yang dipublikasikan secara *online* oleh Kementerian Keuangan.

3.2. Model Penelitian

Besarnya ruang fiskal dan kapasitas fiskal daerah memberi keleluasaan daerah dalam mengalokasikan anggarannya ke sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah.



Skema hubungan antara variabel dana perimbangan dengan variabel-variabel yang memengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$PDRB = \alpha + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 BB_{it} + \beta_3 BBS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

PDRB : Produk Regional Domestik Bruto

BM : belanja modal kementerian/lembaga (K/L)

BB : belanja barang kementerian/lembaga (K/L)

BBS : belanja bantuan sosial kementerian/lembaga (K/L)

β_1 - β_3 : koefisiensi

i : *cross section*

t : *time series*

ε_i : *error term*

3.3. Hipotesis Penelitian

Dari model tersebut di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : variabel belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

H_1 : variabel belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka dilakukan proses pemilihan model terbaik melalui tahapan, yaitu:

4.1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu *Chow-test*, *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier Test*.

4.1.1. Pemilihan Model *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM)

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji Chow untuk menentukan apakah *common effect model* (CEM/PLS) yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model* (FEM).

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi square* > 0,05 , maka yang diterima adalah CEM.

H_1 = Jika *Chi square* < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima FEM.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
<i>Cross-section F</i>	383.759138	(32,96)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	641.413057	32	0.0000

Sumber: Hasil olahan data

Hasil pengujian menunjukkan baik *F-test* maupun *Chi-square* signifikan (*p-value* 0,000 atau lebih kecil dari 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti *fixed effect*.

4.1.2. Pemilihan Model *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM)

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji Hausman untuk menentukan apakah *random effect model* (REM) yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model* (FEM).

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi square* > 0,05, maka terima H_0 yaitu REM lebih tepat.

H_1 = Jika *Chi square* < 0,05, maka tolak H_0 , yaitu FEM lebih tepat.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
<i>Cross-section random</i>	227.153925	3	0.0000

Sumber: Hasil olahan data

Hasil pengujian menunjukkan signifikan (p -value 0,0000 kurang dari 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian model mengikuti *fixed effect*.

4.1.3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* harus dilakukan jika pada proses pemilihan model melalui uji *Chow* dan uji *Hausman* menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu:

- Uji *Chow* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *common effect* daripada *fixed effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah *common effect* lebih baik daripada *random effect*, maka diperlukan *Lagrange Multiplier Test*.
- Uji *Hausman* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *random effect* daripada *fixed effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah *random effect* lebih baik daripada *common effect*, maka diperlukan uji *Lagrange Multiplier*.

Dikarenakan uji *Chow* maupun uji *Hausman* menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *fixed effect*, maka tidak diperlukan uji LM.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Pertama

	BM	BB	BBS
BM	1	0.8259780916311264	0.4184276108382397
BB	0.8259780916311264	1	0.4435651180226061
BBS	0.4184276108382397	0.4435651180226061	1

Sumber: Hasil olahan data

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar variabel independen BB di bawah 0,80 yang berarti ada multikolinearitas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas, adalah dengan mengeluarkan variabel independen yang bermasalah, dalam hal ini adalah variabel BB. Sehingga model penelitian hanya menggunakan 2 variabel saja yaitu BM dan BBS. Selanjutnya diuji kembali apakah masih terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji kedua di Tabel 4, model sudah terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Kedua

	BM	BBS
BM	1	0.4184276108382397
BBS	0.4184276108382397	1

Sumber: Hasil olahan data

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Proses melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Uji Glejser meregresikan variabel-variabel bebas terhadap residual absolut. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sementara absolut adalah nilai mutlaknya. Uji Glejser ini hanya berlaku pada *fixed effect*. Jadi, ketika hasil analisis dan pemilihan model regresi yang dipilih adalah *fixed effect model* (FEM), maka uji Glejser perlu digunakan. Hal itu untuk melihat apakah terjadi pelanggaran asumsi klasik heteroskedastisitas pada model regresi atau tidak.

Tabel 5. Hasil Uji Glejser

<i>F-statistic</i>	1.292745	<i>Prob. F (2,3)</i>	0.3936	
<i>Obs*R-squared</i>	2.777364	<i>Prob. Chi-Square (2)</i>	0.2494	
<i>Scaled explained SS</i>	2.053069	<i>Prob. Chi-Square (2)</i>	0.3582	
<i>Dependent Variable: ARESID</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-72519.49	92344.28	-0.785317	0.4896
BM	26.27061	29.36734	0.894552	0.4369
BBS	-3.962830	12.93249	-0.306424	0.7793

Sumber: Hasil olahan data

Indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, adalah apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas pada setiap variabel independen $> 0,05$ maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

Karena nilai probabilitas untuk variabel BM dan BBS lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

4.3. Interpretasi Hasil

Setelah terpilihnya model *fixed effect* dengan serangkaian uji asumsi klasik, maka dilakukan uji *Goodness of Fit*. Uji *Goodness of Fit* pada penelitian ini terdiri dari uji F statistik, uji t statistik dan uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 6. Hasil Uji Goodness of Fit

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/19/20 Time: 13:53
 Sample: 2014 2019
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 198

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	215169.2	9956.172	21.61164	0.0000
BM	15.35824	3.057493	5.023149	0.0000
BBS	-45.12754	3.386714	-13.32487	0.0000
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
R-squared	0.996279	Mean dependent var	250146.2	
Adjusted R-squared	0.995503	S.D. dependent var	341870.0	
S.E. of regression	22926.32	Akaike info criterion	23.07698	
Sum squared resid	8.57E+10	Schwarz criterion	23.65824	
Log likelihood	-2249.621	Hannan-Quinn criter.	23.31225	
F-statistic	1283.576	Durbin-Watson stat	1.441452	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan data.

4.3.1. Uji F-statistic

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji F-stat

F-Statistik	p-value	Kesimpulan
1283,576	0,000000	Signifikan
Daerah kritis H_0 ditolak jika $p\text{-value} < 0,05$ (α)		

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value}$ $0,0000 < 0,05$ (α), maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu PDRB.

4.3.2. Uji t-statistic

Uji $t\text{-statistic}$ dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis dalam pengujian $t\text{-statistic}$ adalah:

H_0 : variabel belanja modal dan belanja bantuan sosial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

H_1 : variabel belanja modal dan belanja bantuan sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

Jika probabilitas nilai $t_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 , sebaliknya jika probabilitas nilai $t_{hitung} < 0,05$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 5 persen.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	215169.2	9956.172	21.61164	0.0000
BM	15.35824	3.057493	5.023149	0.0000
BBS	-45.12754	3.386714	-13.32487	0.0000

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel independen BM dan BBS secara signifikan berpengaruh terhadap variabel PDRB. Dengan nilai *p-value* berturut-turut sebesar 0,0000; dan 0,0000, yang lebih kecil dibandingkan $0,05/\alpha$.

4.3.3. Uji Koefisien Determinasi R^2 dengan Variabel yang Signifikan

Uji koefisien determinasi R^2 dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 9. Uji R^2 dengan Variabel yang Signifikan

Koefisiensi determinasi	
<i>R-squared</i>	0.996279
<i>Adjusted R-squared</i>	0.995503

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 99,6 persen dari PDRB dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial, sedangkan sisanya sebesar 0,4 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.4. Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil uji *goodness of fit* (Tabel 6) di atas, maka hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PDRB = 15,3582419098BM - 45,1275410717BBS + 215169,245577 + \varepsilon$$

Berdasarkan pada Tabel 6 juga dapat dijelaskan hubungan antar variabel sebagai berikut:

a. Pengaruh BM terhadap PDRB

Hasil dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan BM, akan meningkatkan PDRB. Kenaikan sebesar Rp1 miliar akan meningkatkan PDRB sebesar Rp15,35 miliar. Belanja modal yang

dialokasikan pemerintah pusat dalam rangka menjalankan asas tugas pembantuan merupakan pelengkap dari akumulasi belanja modal pemerintah daerah, selain dana yang bersumber dari APBN melalui mekanisme dana perimbangan. Untuk membiayai kegiatan fisik di daerah, pemerintah mengalokasikan DAK Fisik yang penggunaannya berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

Penggunaan DAK ditujukan untuk menghasilkan *output* fisik tertentu yang sesuai dan berpedoman pada petunjuk teknis dari K/L terkait. Artinya, menutup kemungkinan penggunaan di luar ketentuan yang ada. Meskipun dalam penggunaannya tidak dapat tumpang tindih antara DAK dan dana TP, namun penggunaan dana TP dapat menambah kualitas *output* fisik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas *output*-nya melalui pendanaan dana TP.

b. Pengaruh BBS terhadap PDRB

Hasil dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan BBS, akan mengurangi PDRB. Kenaikan sebesar Rp1 miliar akan mengurangi PDRB sebesar Rp45,1 miliar. Hasil ini tentunya berlawanan dengan tujuan kebijakan pemberian bantuan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin/tidak mampu.

Berdasarkan karakteristiknya, belanja bantuan sosial ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu (miskin) atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya atau kejadian atau peristiwa yang berdampak pada meningkatnya rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan (KPPN Metro, 2018).

Beberapa hal yang dapat menjelaskan hasil dari persamaan regresi ini antara lain: pertama, belanja bantuan sosial tidak dialokasikan untuk rumah tangga miskin/tidak mampu yang seharusnya menjadi sasaran program. Hal ini diakui oleh Menteri Keuangan mengenai belum efektifnya pemerintah daerah dalam melakukan pemuktakhiran data rumah tangga miskin. Padahal hal ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial. Pemerintah bahkan telah menyiapkan sistem *reward and punishment* bagi upaya pemerintah untuk menyediakan data dinamis mengenai rumah tangga miskin. Di era otonomi dan desentralisasi ini, tugas pemuktakhiran data tidak hanya dimiliki pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah (Republika, 2020). Kedua, penggunaan variabel independen BBS dalam model ini memang tidak memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen yaitu PDRB. Pengaruh variabel BBS lebih tepat dikaitkan langsung dengan indikator tingkat kemiskinan suatu daerah, karena pada dasarnya BBS memang ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin/tidak mampu. Oleh karenanya diperlukan permodelan lain untuk

menggambarkan hubungan BBS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu untuk menggambarkan efektivitas pengalokasiannya di daerah.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Kebijakan belanja K/L dalam rangka melaksanakan asas tugas pembantuan di daerah khususnya melalui alokasi belanja modal dan belanja barang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi modal (investasi) di daerah. Peningkatan alokasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan PDRB daerah.

Berdasarkan hasil permodelan pengaruh belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial terhadap PDRB, menunjukkan variabel belanja barang tidak memenuhi uji multikolinearitas, sehingga hasil permodelan setelah uji asumsi klasik adalah PDRB sebagai variabel dependen, dan variabel independennya adalah belanja modal dan belanja bantuan sosial. Hasil regresi atas model tersebut menunjukkan bahwa kenaikan belanja modal, akan meningkatkan PDRB. Kenaikan sebesar Rp1 miliar akan meningkatkan PDRB sebesar Rp15,35 miliar. Untuk variabel belanja bantuan sosial, kenaikan BBS, akan mengurangi PDRB. Kenaikan sebesar Rp1 miliar akan mengurangi PDRB sebesar Rp45,1 miliar.

5.2. Saran

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan asas tugas pembantuan, pemerintah perlu meningkatkan belanja modal di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah pusat juga perlu mendorong agar pemerintah daerah dapat secara reguler melakukan pemuktakhiran data rumah tangga miskin agar bantuan sosial yang diberikan dapat tersalurkan pada rumah tangga miskin/tidak mampu.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna karena hanya terbatas pada variabel yang diamati saja yaitu variabel independen yaitu belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial dan variabel dependen yaitu PDRB di tingkat provinsi. Penyesuaian terhadap variabel dependen, seperti alokasi belanja modal di tingkat provinsi atau rincian atas variabel independen belanja modal dan belanja barang yang dialokasikan langsung untuk meningkatkan kegiatan ekonomi (seperti pembangunan jembatan, jalan, pasar) diharapkan dapat memberikan hasil pengamatan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Anasmen. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat: 2000-2006 Tesis.. Universitas Indonesia, Depok
- Badan Pusat Statistik. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019
- _____. 2019. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Pengeluaran 2014-2018
- Ekananda, Makyus (2016). Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. 2014. Dasar-Dasar Penyusunan APBN. Edisi II. Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu RI
- _____. Peta Data APBN.
- _____. PMK Nomor 102 tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran
- KPPN Metro. 2018. Belanja Bantuan Sosial (57). Informasi web dalam <http://kppnmetro.org/belanja-bantuan-sosial-57/> diakses tanggal 22/10/2020
- Kuncoro, M. 2011. Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi IV. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. ISBN: 978-602-1286-64-7
- Latip, Dedi. 2009. Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Propinsi Tahun 2000-2006. Tesis. Universitas Indonesia
- Republika. 2020. Sri Mulyani Dorong Pemda Update Data Kemiskinan dalam <https://republika.co.id/berita/qdk3qr370/sri-mulyani-dorong-pemda-update-data-kemiskinan> diakses tanggal 23/10/2020
- Sita, Prima Rosita Arini. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.26486/jramb.v2i2.284>
- Solow, Robert M. 1987. Growth Theory and After. Prize Lecture. NobelPrize.org <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/solow/lecture/> diakses tanggal 22/10/2020
- Widada, R., Hakim, D. B., & Mulatsih, S. 2019. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Di Indonesia. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 6(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25095